

ABSTRAK

Tanah bengkok adalah sebidang tanah atau lahan yang dimiliki desa. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang menjabat sebagai pamong desa sebagai kompensasi gaji atas jabatannya. Tanah bengkok tidak dapat di perjual belikan, namun ketua atau perangkat desa hanya diberikan wewenang untuk mengelola sendiri atau menyewakannya.

Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok yang ada di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Metode penenlitian yang digunakan saat ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua kesimpulan (1) pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok, masyarakat harus datang di balai desa untuk mengikuti sewa menyewa dengan lotre undian. Pihak perangkat desa yang menyiapkan segala persiapan untuk berlangsungnya sewa dengan menggunakan sistem undian atau lotre yang sudah diberikan nama-nama. (2) hambatan dalam melakukan sewa-menyewa tanah bengkok yaitu tidak ada perjanjian secara tertulis hanya melalui lisan dan saling percaya. Solusi Seharusnya ada perjajian tertulis sehingga yang menyewa mengetahui naskah dari suatu perjanjian sewa menyewa

Kata Kunci : Desa, Tanah Bengkok, Pelaksanaan Sewa menyewa.

ABSTRACT

Crooked land is a piece of land or land owned by a village. The land was given to villagers who served as village officials as compensation for their position. Crooked land can not be traded, but the chairman or village apparatus is only given the authority to manage it yourself or lease it.

The purpose of the formulation of this problem is to find out how the implementation of the leased land rent and the obstacles and solutions in the implementation of the leased land rent in the Banjarsari Village, Sayung District, Demak Regency.

The research method used today is an empirical juridical method using primary and secondary data. Primary data collection techniques are done by interview, and secondary data by reading, studying and analyzing primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials with qualitative analysis techniques, interpreted logically and systematically and drawing conclusions.

Based on the results of the study there are two conclusions (1) the implementation of renting land for crooked land, the community must come to the village hall to take part in a renting lottery. The village apparatus prepares all preparations for the lease by using the lottery or lottery system that has been given names. (2) the obstacle in leasing crooked land is that there is no written agreement only through word of mouth and mutual trust. Solution There should be a written agreement so that the lease knows the text of a lease agreement

Keywords: *Village, Crooked Land, Leasing Implementation.*